

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial

2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1998 menyebutkan, kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan pancasila. (Zastrow, 1999) menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah sebuah keadaan dan sistem layanan sosial yang bertujuan untuk mendukung individu, kelompok, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan vital, meningkatkan kemampuan untuk bersosialisasi, serta menyelesaikan berbagai tantangan sosial yang ada. Kesejahteraan sosial diwujudkan lewat beragam program, kebijakan, dan layanan sosial yang dirancang untuk menciptakan situasi hidup yang lebih makmur dan adil. Selanjutnya, Zastrow menggarisbawahi bahwa kesejahteraan sosial mempunyai fungsi krusial dalam menciptakan lingkungan sosial yang positif, sehingga individu dan keluarga, terutama kelompok yang rentan, dapat mengasah potensi diri mereka dan mencapai kemandirian yang lebih baik. *Wilensky dan Charles* dalam Sugeng Pujileksono, kesejahteraan sosial adalah sistem yang terdiri dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial yang bertujuan untuk membantu

individu dan kelompok dalam mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan. Berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dikenal sebagai kesejahteraan sosial. Menurut Pipit Febrianti, *Spicker, Midgley, Tracy dan Livermore, Thompson*, dan Suharto, kesejahteraan dapat didefinisikan dalam empat cara:

- a. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Dalam pengertian ini, istilah “Kesejahteraan Sosial” didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material.
- b. Dalam konteks pelayanan sosial. Di negara-negara seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya terdiri dari lima kategori, yaitu jaminan sosial, layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, dan layanan sosial individu.
- c. Sebagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan kepada mereka yang hidup dalam kemiskinan, karena mayoritas penerima bantuan sosial adalah individu yang kurang mampu, penyandang disabilitas, atau pengangguran. Situasi ini menciptakan persepsi negatif terhadap istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, ketidakteraturan, dan ketergantungan, yang sebenarnya lebih tepat diciptakan istilah "*social illfare*" daripada "*social welfare*".
- d. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) melalui pemberian pelayanan sosial (pengertian ke dua) dan

tunjangan sosial (pengertian ketiga). Menurut *Gertrude Wilson* dalam Sugeng Pujileksono kesejahteraan sosial adalah usaha yang terorganisir dari semua untuk semua. Defenisi semacam ini menunjukkan bahwa usaha-usaha untuk mencapai kesejahteraan sosial itu adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan terorganisir dengan melihat unsur-unsur atau potensi-potensi yang ada di masyarakat.

2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial ini guna mendorong masyarakat dalam mencapai suatu kondisi yang sejahtera dalam kehidupannya. Tujuan ini juga berkaitan dengan perubahan-perubahan yang sudah atau akan dicapai oleh masing masing individu meliputi perubahan fisik, mental, ekonomi sosial dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pencapaian tujuan. Menurut Fahrudin 2014.) menyatakan bahwa tujuan kesejahteraan sosial adalah:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan dan relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, msalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan

Menurut *Thelma Lee Mendoza* dalam (Adi Isbandi, 2013) terdapat tiga tujuan

utama yang terkait dengan kesejahteraan sosial (yang pada umumnya berhubungan dengan upaya memperoleh sumber daya yang terbatas):

a. Tujuan yang bersifat kemanusiaan dan keadilan sosial (*humanitarian and social justice goals*) : Tujuan kesejahteraan sosial ini berakar dari gagasan ideal demokratik mengenai keadilan sosial, dan hal ini berasal dari keyakinan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Meskipun potensi tersebut kadang kala tertutup karena adanya hambatan fisik, sosial, ekonomi, psikis, dan berbagai faktor lainnya yang menghambat dirinya untuk mengenali potensi yang ia miliki. Berdasarkan tujuan ini, usaha kesejahteraan sosial banyak diarahkan pada upaya pengidentifikasikan kelompok yang paling mempunyai ketergantungan; kelompok yang paling terlantar; ataupun kelompok yang tidak mampu menolong dirinya sendiri, dan menjadikan mereka kelompok sasaran dalam kaitannya dengan upaya menjembatani sumber daya yang langka.

b. Tujuan yang berkaitan dengan pengendalian sosial (*social control goal*): Tujuan ini berdasarkan pemahaman bahwa kelompok yang tidak diuntungkan; kekurangan; ataupun tidak terpenuhi kebutuhannya dapat melakukan “serangan” (baik secara individu atau kelompok) terhadap masyarakat (terutama yang sudah mapan). Oleh karena itu masyarakat tersebut harus berupaya untuk “mengamankan” diri dari sesuatu yang dapat mengancam kehidupan; pemilikan; maupun stabilitas politik yang sudah berjalan. “Ancaman” seperti ini biasanya dimunculkan oleh kelompok yang kurang mempunyai kesempatan dan sumber

daya untuk mendapatkan taraf hidup yang memadai. Usaha kesejahteraan sosial yang diberikan pada pelaku “kejahatan” baik remaja maupun dewasa merupakan salah satu perwujudan dari tujuan pengendalian sosial dari kesejahteraan sosial.

c. Tujuan yang terkait dengan pembangunan ekonomi (*Economic Development Goal*): Tujuan pembangunan ekonomi memprioritaskan pada program-program yang dirancang untuk meningkatkan produksi barang dan pelayanan yang diberikan, ataupun berbagai sumber daya lain yang dapat memberikan sumbangan terhadap pembangunan ekonomi

2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial

Pekerja sosial memiliki peran untuk memfasilitasi individu agar dapat berfungsi secara optimal dalam peran dan status mereka dalam institusi sosial ; Mereka bertujuan untuk membantu individu agar dapat beroperasi secara maksimal dalam konteks sosial, dengan cara sebagai berikut:

1. Mendukung pengembangan potensi menuju produktivitas dan aktualisasi diri, baik pada individu maupun komunitas sosial mereka, demi terciptanya bentuk-bentuk sosial baru yang inovatif dan bersifat altruistik, serta kehidupan bersama yang harmonis.
2. Membantu individu dalam upaya untuk mengembalikan dan mendapatkan kembali standar kehidupan yang lebih baik dan lebih memuaskan sebagai bagian dari masyarakat, melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan yang terhalang atau tidak memadai. Usaha ini dilakukan dengan memanfaatkan seminimal

mungkin sumber-sumber layanan yang ada dari kelompok sosial atau lembaga yang relevan; serta dengan menangani serta mengatasi tantangan dan membangun hubungan sosial di antara mereka.

3. Berfungsi sebagai pengganti bagi keluarga dan komunitas dalam memberikan bentuk dukungan yang sifatnya membantu, substitutif, melindungi, dan pencegahan kepada individu atau keluarga.

4. Menghubungkan orang-orang satu sama lain, bertindak sebagai perantara, serta menyatukan dan mengintegrasikan individu dengan komunitas sosial mereka, khususnya terkait dengan sumber-sumber kesejahteraan sosial yang tersedia.

2.1.4 Pendekatan Kesejahteraan sosial

Menurut Pandangan *midgley*, terdapat empat metode dalam usaha mencapai kesejahteraan sosial, yaitu:

a. Filantropi sosial

Filantropi memiliki hubungan yang kuat dengan inisiatif kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh para pendeta sukarelawan. Tindakan amal dimana individu tersebut memberikan waktu, sumber daya, dan energi untuk menolong sesama. Para pelaku di sebut sebagai filantropis. Tujuan dari filantropis sosial adalah untuk memajukan kesejahteraan sosial dengan mendorong penyediaan barang dan layanan bagi mereka yang sedang membutuhkan.

b. Pekerja sosial

Pendekatan pekerja sosial merupakan suatu metode terstruktur untuk mendukung kesejahteraan sosial dengan memanfaatkan tenaga profesional yang berkompeten dalam menangani isu-isu sosial.

c. Administrasi sosial

Pendekatan administrasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan menciptakan berbagai program sosial yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui penyediaan layanan sosial.

d. Pembangunan sosial

Proses terencana dari perubahan sosial yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, di mana langkah-langkah pembangunan bertujuan untuk melengkapi proses dinamis dari pembangunan ekonomi.

2.1.5 Nilai Dan Prinsip Dasar Dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial

Nilai dasar dalam ilmu kesejahteraan sosial merupakan pedoman etis dan filosofis yang mendasari seluruh praktik, kebijakan, dan pelayanan sosial. Nilai-nilai ini menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

(1) Nilai Kemanusiaan (*Human Dignity*)

Ilmu kesejahteraan sosial menjunjung tinggi martabat dan harga diri manusia. Setiap individu dipandang memiliki nilai yang sama tanpa diskriminasi atas dasar ekonomi, sosial, budaya, maupun kondisi fisik. Menurut (Suharto, 2010b),

kesejahteraan sosial berorientasi pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial yang berhak hidup layak.

(2) Nilai Keadilan Sosial

Keadilan sosial merupakan nilai fundamental dalam kesejahteraan sosial yang menekankan pemerataan kesempatan dan akses terhadap sumber daya sosial. (W. A. , & A. R. Z. Friedlander, 1982) menyatakan bahwa kesejahteraan sosial bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan keadilan melalui pelayanan sosial yang terorganisasi.

(3) Nilai Solidaritas Sosial

Solidaritas sosial menekankan tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, dan negara dalam menangani masalah sosial. Nilai ini mencerminkan kepedulian sosial dan kerja sama untuk membantu kelompok rentan (Midgley, 1995).

(4) Nilai Pemberdayaan (Midgley, 1955)

Pemberdayaan merupakan nilai yang menempatkan individu dan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat bantuan, tetapi juga mendorong kemandirian dan penguatan kapasitas sosial masyarakat (Suharto, 2009)

Prinsip dasar merupakan pedoman operasional dalam pelaksanaan praktik kesejahteraan sosial agar sejalan dengan nilai-nilai yang dianut.

(1) Prinsip Keberfungsian Sosial

Prinsip ini menekankan bahwa tujuan utama kesejahteraan sosial adalah membantu individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu menjalankan peran sosialnya

secara optimal. Menurut Skidmore, (Skidmore et al., 1997), keberfungsian sosial menjadi indikator utama keberhasilan intervensi kesejahteraan sosial.

(2) Prinsip Partisipasi

Prinsip partisipasi menghendaki keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap proses pelayanan dan program kesejahteraan sosial. J. O. Midgley (1955) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan.

(3) Prinsip Non-Diskriminasi

Ilmu kesejahteraan sosial menolak segala bentuk diskriminasi dan menjamin kesetaraan akses pelayanan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan dan terpinggirkan (W. A. Friedlander, 1980)

(4) Prinsip Kemandirian

Prinsip ini menekankan bahwa pelayanan sosial harus mendorong individu dan keluarga untuk mandiri, bukan bergantung secara terus-menerus pada bantuan sosial. Prinsip kemandirian menjadi landasan dalam program pemberdayaan sosial (Suharto, 2009)

(5) Prinsip Keberlanjutan

Prinsip keberlanjutan menekankan bahwa upaya kesejahteraan sosial harus bersifat jangka panjang dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi (J. (1995) Midgley, 1995)

Nilai dan prinsip dasar dalam ilmu kesejahteraan sosial merupakan fondasi etis dan profesional dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Nilai memberikan arah normatif, sedangkan prinsip berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan agar

kesejahteraan sosial dapat diwujudkan secara adil, manusiawi, dan berkelanjutan.

2.2 Konsep Pekerjaan Sosial

2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial

Asosiasi Pekerja Sosial Nasional di Amerika Serikat mendefinisikan pekerjaan sosial dengan cara berikut “Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas dalam meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka untuk berfungsi secara sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang mendukung tujuan-tujuan mereka. Praktik pekerjaan sosial meliputi penerapan profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial untuk mencapai salah satu atau beberapa tujuan berikut: membantu orang dalam mendapatkan layanan-layanan yang nyata; memberikan konseling dan terapi psikologis bagi individu, keluarga, dan kelompok; mendukung komunitas atau kelompok dalam menyediakan atau memperbaiki layanan sosial dan kesehatan; serta berpartisipasi dalam proses legislasi yang relevan (NASW, 2013).

Hasil ini menunjukkan bahwa pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional yang bertujuan menolong individu, kelompok, atau masyarakat dalam meningkatkan atau mengembalikan kemampuan mereka dalam berfungsi secara sosial dan untuk menciptakan kondisi sosial yang kondusif bagi tujuan-tujuan tersebut. Praktik dalam pekerjaan sosial mencakup penerapan profesional dari nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik bidang ini pada satu atau lebih tujuan berikut: membantu orang untuk memperoleh layanan-layanan nyata; memberikan

konseling dan terapi psikologis untuk individu, keluarga, dan kelompok; mendukung komunitas atau kelompok dalam menyediakan atau memperbaiki layanan-layanan sosial dan kesehatan; serta terlibat dalam proses-proses legislatif yang bersangkutan. Praktik pekerjaan sosial membutuhkan pemahaman tentang perkembangan dan perilaku manusia, institusi sosial, ekonomi, dan budaya, serta memahami interaksi antara berbagai faktor. (Fahrudin, n.d. 2018).

2.2.2 Fokus Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan sebuah bidang profesi yang telah mengalami perkembangan selama lebih dari 50 tahun. Secara bertahap profesi ini mulai mendapat perhatian dari masyarakat, khususnya setelah disahkannya Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2019 mengenai pekerja sosial.

Pekerjaan sosial berfungsi sebagai suatu proses yang memberikan bantuan atau dukungan, dengan peranan yang disesuaikan dari tahap awal hingga akhir. Fungsi pekerja sosial meliputi peran sebagai fasilitator, mediator, broker, pengarah, perencana, penyelesaian masalah, dan penilai. Semua ini bertujuan untuk memperkuat fungsi sosial dan melaksanakan peran sosialnya yang dapat diukur melalui strategi dalam pekerjaan sosial. Menurut pandangan Dubois dan Miley yang dikutip dalam (Suharto, 2009) adalah sebagai berikut :

1. Mengasah kemampuan individu dalam menghadapi tantangan yang sedang mereka hadapi.
2. Menghubungkan individu dengan sistem serta jaringan sosial yang memungkinkan mereka untuk mengakses dan mendapatkan beragam sumber layanan serta peluang.

3. Meningkatkan kinerja lembaga sosial agar dapat memberikan layanan sosial dengan cara yang efektif, berkualitas, dan manusiawi.
4. Merumuskan dan mengembangkan regulasi serta peraturan yang mampu menciptakan lingkungan yang mendukung tercapainya kesetaraan ekonomi dan keadilan sosial.

2.2.3 Metode Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial memiliki metode nya tersendiri yang diterapkan untuk menangani permasalahan klien. Seorang pekerja sosial perlu menguasai metode yang efektif dalam praktiknya agar tidak keliru dalam melayani klien serta dapat mengetahui apa yang sedang dialami klien.

1. Social Case Work

Social Case Work merupakan suatu metode yang bersifat mikro yang bertujuan untuk membantu individu. Metode ini dilandasi oleh pengetahuan ilmiah, pemahaman, dan penggunaan teknik secara terampil yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan potensi individu secara maksimal.

2. Social Group Work

Metode kerja kelompok sosial adalah pendekatan yang diterapkan melalui kolaborasi dalam suatu grup. Tujuan dari metode ini adalah untuk mendukung individu di dalam kelompok agar mereka mampu menghadapi tantangan dan memperbaiki fungsi sosial. Dalam pendekatan ini pekerja sosial memberikan arahan terhadap interaksi antar individu dalam kelompok.

Ini dilakukan untuk memungkinkan agar anggota saling terhubung dan mengalami perkembangan.

3. *Community Organization/Community Development*

Metode ini merupakan model intervensi komunitas masyarakat yang lebih luas yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat.

2.2.4 Prinsip Pekerjaan Sosial

Mengenai gagasan – gagasan yang perlu diperhatikan dalam praktik pekerjaan sosial.(Taufiqurokhman, 2021)

1. Penerimaan (*Acceptance*)

Pekerja sosial harus menerima klien sebagaimana adanya tanpa memberikan penilaian atau menghakimi. Penerimaan dilakukan terhadap kondisi, perasaan, dan pengalaman klien sehingga tercipta hubungan profesional yang baik.

2. Komunikasi (*Communication*)

Pekerja sosial harus mampu mendengarkan, memahami, dan menangkap pesan yang disampaikan klien, baik secara verbal maupun nonverbal. Komunikasi yang baik membantu pekerja sosial memahami kebutuhan dan permasalahan klien secara tepat.

3. Individualisasi (*Individualization*)

Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu memiliki karakteristik, kebutuhan, dan permasalahan yang berbeda. Oleh karena itu, pekerja sosial harus memperlakukan setiap klien secara unik dan tidak menyamaratakan

penanganan kasus.

4. Partisipasi (*Participation*)

Pekerja sosial perlu mendorong keterlibatan aktif klien dalam proses pemecahan masalah. Klien tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga berperan dalam menentukan keputusan dan tindakan yang akan dilakukan.

5. Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Pekerja sosial wajib menjaga kerahasiaan seluruh informasi yang diperoleh dari klien selama proses pertolongan. Informasi tersebut hanya dapat diungkapkan atas persetujuan klien atau untuk kepentingan profesional dan hukum yang berlaku.

6. Kesadaran Diri (*Self-Awareness*)

Pekerja sosial harus menyadari nilai, sikap, perasaan, dan pengalaman pribadinya agar tidak memengaruhi objektivitas dalam memberikan pelayanan kepada klien.

2.2.5 Peran Pekerjaan Sosial

Menurut (Suharto Edi, 2014) menjelaskan bahwa pekerjaan sosial merupakan profesi yang bertujuan membantu individu, kelompok, dan masyarakat agar mampu berfungsi sosial secara optimal. Pekerjaan sosial tidak hanya berorientasi pada pemecahan masalah sosial, tetapi juga pada penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Peran pekerjaan sosial mencakup beberapa peran utama berikut.

1. Fasilitator: Membantu individu, kelompok, atau masyarakat mengenali masalah, potensi, dan sumber daya yang dimiliki serta mempermudah

proses pemecahan masalah.

2. Broker (Perantara): Menghubungkan klien dengan sumber pelayanan, program, atau lembaga yang dibutuhkan.
3. Advokat: Membela hak dan kepentingan klien, terutama kelompok rentan yang mengalami ketidakadilan.
4. Enabler (Pemberdaya): Meningkatkan kemampuan klien agar mampu menolong dirinya sendiri dan mandiri.
5. Educator (Pendidik): Memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada klien atau masyarakat.
6. Konselor: Membantu klien memahami permasalahan dan mengambil keputusan yang tepat.
7. Koordinator: Mengoordinasikan berbagai layanan dan pihak yang terlibat dalam penanganan masalah klien.

2.3 Konsep Teori Pemberdayaan

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan serta keberdayaan individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, mengambil keputusan secara mandiri, serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pemberdayaan tidak hanya dipahami sebagai pemberian bantuan yang bersifat sementara, tetapi juga sebagai upaya untuk menciptakan kemandirian dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengatasi

berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Menurut Suharto (2010), pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat keberdayaan kelompok rentan dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sebagai tujuan, pemberdayaan diarahkan pada terciptanya masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif, serta mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan pembangunan. (Suharto,2010)menjelaskan bahwa pemberdayaan dilaksanakan melalui lima pendekatan utama, yaitu pemungkinan (*enabling*), penguatan (*empowering*), perlindungan (*protecting*), penyokongan (*supporting*), dan pemeliharaan (*maintaining*).

Sejalan dengan pendapat tersebut, Isbandi Rukminto Adi (2013) menjelaskan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek yang hanya menerima manfaat program, melainkan sebagai aktor utama yang berperan aktif dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi program. Melalui keterlibatan aktif tersebut, masyarakat diharapkan mampu mengenali potensi yang dimiliki, meningkatkan kapasitas diri, serta memperoleh akses terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan

kapasitas individu, peningkatan partisipasi sosial, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pengembangan kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan menjadi salah satu strategi penting dalam membantu kelompok rentan untuk mencapai kesejahteraan dan keberfungsian sosial yang lebih baik.

Berdasarkan pandangan Suharto dan Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu maupun kelompok agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, mengakses sumber daya, memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial. Dalam penelitian ini, konsep pemberdayaan digunakan untuk memahami pelaksanaan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) sebagai upaya meningkatkan keberdayaan perempuan kepala keluarga melalui peningkatan kapasitas, penguatan kapasitas, pendampingan, dan perlindungan sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya secara lebih mandiri.

Adapun beberapa pengertian pemberdayaan menurut para ahli adalah

- a. Pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk didalamnya (Mardikanto, 2014)
- b. Gunawan (2009) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah tindakan sosial sebuah komunitas di dalam penduduk dimana ia mengorganisasikan dirinya dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif agar mampu menyelesaikan persoalan

sosial atau memenuhi kebutuhan sosial dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (dalam Hamid, 2018).

c. Widjayanti (2011) mengatakan bahwa pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan dan menentukan masa depan lebih baik.

d. Menurut Suharto (dalam Hamid, 2018) pemberdayaan bertitik tekan pada kemampuan yang lemah pada diri seseorang atau kelompok, sehingga diharapkan mampu:

- 1) Memenuhi kebutuhan pokok/dasar mereka sehingga mampu merasakan kebebasan dalam arti bebas dalam hal kelaparan, kebodohan dan kesakitan.
- 2) Meningkatkan pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa yang berkualitas sesuai kebutuhan dengan cara menjangkau dan mengolah sumber daya produktif.
- 3) Mengambil peran dalam segala kegiatan pembangunan dan berbagai keputusan kebijakan yang mampu meningkatkan kesejahteraan mereka.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan

Prinsip dapat dipahami sebagai aturan yang ada atau diikuti. Prinsip berfungsi sebagai dasar yang membantu dalam bertindak, sebagai petunjuk dalam proses, dan sebagai sasaran yang ingin dicapai. Menurut Mathew dalam pendapat Mardikanto, prinsip adalah sebuah pernyataan mengenai kebijakan yang digunakan sebagai patokan dalam membuat keputusan serta menjalankan kegiatan secara konsisten. Oleh karena itu, prinsip berlaku secara luas dan dapat diterima secara umum, sehingga menjadi pondasi yang besar untuk pelaksanaan kegiatan yang akan

dilaksanakan. Mardikanto juga menambahkan bahwa prinsip-prinsip pemberdayaan mencakup aspek keterlibatan, yang berarti harus melibatkan sebanyak mungkin masyarakat untuk melakukan sesuatu. Akibat dari pemberdayaan harus memberikan manfaat yang positif.

Asosiasi menunjukkan bahwa setiap kegiatan pemberdayaan harus berkaitan dengan kegiatan lainnya. Di sisi lain, menurut Dahama dan Bhatnagar, prinsip pemberdayaan meliputi minat dan kebutuhan masyarakat, melibatkan organisasi komunitas di tingkat bawah, penyesuaian terhadap keberagaman budaya lokal, menghindari *shock culture* atau perubahan budaya yang mendadak bagi masyarakat, kerjasama serta partisipasi, serta menerapkan demokrasi dalam ilmu, yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengusulkan metode pemberdayaan atau mengambil keputusan.

2.3.3 Tujuan Pemberdayaan

Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu dan kelompok agar bisa mengendalikan kehidupan dan keputusan yang memengaruhi mereka. Menurut Kabeer pemberdayaan adalah proses yang memungkinkan seseorang, terutama perempuan, membuat keputusan strategis dalam hidup mereka dan mewujudkan dalam tindakan nyata, meskipun sebelumnya terbatas oleh struktur sosial yang tidak adil. Pemberdayaan menekankan pada penguatan kemampuan, akses terhadap sumber daya, serta kemampuan bertindak (*agency*) agar individu dan kelompok bisa menghadapi tantangan hidup dan aktif dalam proses sosial, ekonomi, dan pembangunan.

Tujuan pemberdayaan secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. meningkatkan kemampuan individu dan kelompok dalam menghadapi tantangan hidup.
2. memperluas akses terhadap sumber daya dan peluang yang sebelumnya terbatas.
3. memperkuat kemampuan bertindak dan pengambilan keputusan bersama
4. mendorong kemandirian dan keberlanjutan sosial-ekonomi.
5. mewujudkan partisipasi yang bermakna dalam kehidupan sosial dan pembangunan.

Dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut, pemberdayaan memungkinkan individu dan kelompok untuk memaksimalkan kemampuan dan sumber daya yang mereka miliki, membuat keputusan secara mandiri, dan menjalankan peran sosial secara efektif dalam masyarakat, sehingga tercipta kesejahteraan dan kesetaraan yang lebih nyata.

2.3.4 Tahapan Pemberdayaan

Program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sangat diharapkan mampu untuk mengangkat taraf kehidupan masyarakat binaan sebagai objek sasaran menjadi lebih sejahtera, berdaya, mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup dan bisa menciptakan suatu kemandirian yang berkelanjutan. Dengan kata lain, kemandirian tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, namun juga secara sosial, budaya, hak bersuara/berpendapat, bahkan sampai pada kemandirian masyarakat dalam

menentukan hak-hak politiknya (Hamid, 2018). Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012) terdapat beberapa tujuan pemberdayaan (Dalam Hamid, 2018), yaitu:

1. *Better Education*

Perbaikan pendidikan hendaknya menjadi elemen dari tujuan pemberdayaan, karena ia merupakan pondasi dasar dalam pemberdayaan keberlanjutan. Perbaikan pendidikan hendaknya tidak hanya mencakup perbaikan materi, metode, waktu, tempat dan interaksi antara fasilitator dengan masyarakat binaan, namun tidak lebih pentingnya yakni mendorong masyarakat binaan untuk terus belajar tanpa batas waktu dan umur.

2. *Better Accessibility*

Pada aspek perbaikan aksesibilitas maka diharapkan mampu memperbaiki aksesibilitas pada sumber informasi, keuangan, penyediaan produk, peralatan dan lembaga pemasaran.

3. *Better Action*

Dengan adanya perbaikan pendidikan dan aksesibilitas yang beragam (SDA, SDM, Sumber daya lainnya) maka diharapkan mampu melahirkan tindakan yang semakin membaik.

4. *Better Institution*

Untuk menjalin kemitraan usaha, maka perlu adanya perbaikan kelembagaan. Perihal ini akan berdampak pada meningkatnya posisi tawar yang kuat pada masyarakat.

5. *Better Business*

Dengan bermodalkan empat usaha dan tujuan yang dilakukan diatas, maka secara langsung dan nyata akan berdampak pada perbaikan usaha atau bisnis yang dikembangkan.

6. *Better Income*

Dengan adanya perbaikan usaha atau bisnis yang terus dikembangkan maka diharapkan mampu memperbaiki pendapatan yang diperoleh baik ada cakupan keluarga maupun kelompok.

7. *Better Environment*

Perbaikan pendapatan yakni modal yang dimiliki maka juga akan berdampak pada perbaikan lingkungan baik secara fisik maupun sosial.

8. *Better Living*

Disaat pendapatan masyarakat atau keluarga dan perbaikan lingkungan meningkat, maka tentunya akan mampu menciptakan situasi kehidupan yang lebih baik.

9. *Better Community*

Perbaikan masyarakat akan tercipta dikala lingkungan yang baik secara fisik dan sosial dan situasi kehidupan yang lebih baik dapat terwujud.

2.3.5 Pendekatan Pemberdayaan

Pendekatan pemberdayaan merupakan landasan strategi yang digunakan untuk mengubah kondisi individu, kelompok, maupun komunitas marginal dari situasi ketidakberdayaan menjadi mandiri, sehingga mereka mampu mengatasi permasalahan hidupnya dan menjalankan peran sosial secara optimal di dalam masyarakat (Suharto, 2010). Dalam ranah ilmu kesejahteraan sosial dan intervensi

komunitas, pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses multidimensional yang berorientasi pada penguatan kapasitas psikososial, institusional, dan ekonomi kelompok rentan (Sari & Rahardjo, 2022; Suharto, 2010). Merujuk pada konsep teoritis yang dikembangkan oleh Suharto (2010), implementasi program pemberdayaan masyarakat yang ideal harus dilaksanakan secara komprehensif melalui lima pilar pendekatan utama sebagai berikut:

1. Pemungkinan (*Enabling*)

Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap individu atau komunitas pada dasarnya memiliki potensi atau daya tersembunyi yang dapat dikembangkan (Suharto, 2010). Fokus utama pendekatan enabling adalah menciptakan iklim, suasana, atau lingkungan yang kondusif agar potensi yang dimiliki oleh kelompok sasaran tersebut dapat dibangkitkan (Suharto, 2010). Proses ini berorientasi pada penyadaran kritis untuk menumbuhkan motivasi, harga diri, dan rasa percaya diri masyarakat mengenai eksistensi serta kemampuan diri mereka (Wahyuni & Hidayat, 2024).

2. Penguatan (*Empowering*)

Pendekatan penguatan berfokus pada upaya memperkuat daya, kapasitas, atau kompetensi nyata yang dimiliki oleh sasaran program melalui serangkaian tindakan yang terstruktur (Suharto, 2010). Langkah konkret dari pendekatan ini meliputi penyelenggaraan berbagai pelatihan keterampilan vokasional, perluasan akses terhadap sumber-sumber informasi ekonomi, peningkatan pengetahuan, serta pembukaan akses permodalan stimulan (Sari & Rahardjo, 2022). Melalui penguatan kapasitas ini, masyarakat diharapkan menjadi lebih cakap dalam mengelola

produktivitas dan kemandirian ekonominya (Suharto, 2010).

3. Perlindungan (*Protecting*)

Pemberdayaan masyarakat harus menyertakan aspek proteksi guna mencegah terjadinya eksploitasi, diskriminasi, atau persaingan yang tidak seimbang antara kelompok yang lemah dengan kelompok yang kuat (Suharto, 2014). Pendekatan ini menekankan pada keberpihakan dan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi rawan sosial ekonomi (Suharto, 2014). Dimensi perlindungan ini sangat krusial untuk menjamin rasa aman sasaran dan menjaga stabilitas kondisi mereka dari guncangan sosial-ekonomi yang tidak menentu (Suharto Edi, 2014; Wahyuni & Hidayat, 2024).

4. Penyokongan (*Supporting*)

Pendekatan penyokongan diwujudkan dalam bentuk pemberian bimbingan, konsultasi, dan arahan yang dilakukan secara terus-menerus agar kelompok sasaran tidak terjatuh kembali ke dalam siklus ketidakberdayaan (Suharto, 2010). Strategi utamanya adalah kehadiran para pendamping sosial atau fasilitator lapangan yang bersifat responsif, mudah diakses, serta mampu memfasilitasi jalan keluar (problem solving) yang praktis ketika masyarakat menghadapi hambatan dalam menjalankan aktivitas sosial maupun ekonominya.

5. Pemeliharaan (*Maintaining*)

Pendekatan pemeliharaan bertujuan untuk menjaga situasi yang sudah berdaya agar tetap kondusif dan dapat berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*) (Suharto, 2010). Langkah strategis yang ditempuh adalah dengan memelihara dinamika kelompok usaha bersama, menjaga soliditas organisasi berbasis komunitas, serta

membangun kemiteraan lintas sektor guna memastikan keberlanjutan akses dan program, sehingga kemandirian masyarakat tetap terjaga dalam jangka panjang (Wahyuni & Hidayat, 2024)

2.4 Kebutuhan Dasar



Menurut (Asmadi, 2008), lima kebutuhan dasar manusia adalah:

a. Kebutuhan Fisiologi (*Physiological Needs*)

Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan utama yang harus terpenuhi untuk menjaga homeostasis biologis dan kelangsungan hidup setiap individu. Kebutuhan ini menjadi dasar, dan jika tidak terpenuhi, maka dapat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan lainnya. Kebutuhan fisiologis mencakup oksigen, cairan, nutrisi, eliminasi, istirahat, tidur, bebas dari rasa nyeri, pengaturan suhu tubuh, kebutuhan seksual, dan sebagainya. Ketika kebutuhan fisiologis ini telah terpenuhi, maka seseorang akan mulai memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi secara bertahap.

b. Kebutuhan Keselamatan dan Keamanan (*Self Security Needs*)

Kebutuhan akan keselamatan dan keamanan mencakup perlindungan diri dari berbagai ancaman, baik fisik maupun psikososial. Ancaman terhadap keselamatan fisik dapat dikategorikan sebagai ancaman mekanik, kimia, termal, atau bakteri. Kebutuhan ini berhubungan dengan aspek fisiologis dan relasi interpersonal. Dalam

konteks fisiologis, keselamatan dan keamanan berkaitan dengan ancaman yang mempengaruhi tubuh dan kehidupan seseorang. Ancaman ini bisa nyata atau imajinasi; ancaman fisiologis meliputi penyakit, nyeri, dan kecemasan. Sedangkan ancaman psikologis dapat berupa penyesuaian terhadap lingkungan baru, perubahan peran, dan sebagainya.

c. Kebutuhan Mencintai dan Dicintai (*Love ad Belongingness Needs*)

Kebutuhan cinta merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan dengan emosi seseorang. Kebutuhan ini mendorong individu untuk menjalin hubungan emosional yang berarti dengan orang lain. Dorongan ini semakin kuat, sehingga individu berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan akan cinta dan perasaan memiliki. Kebutuhan ini umumnya muncul setelah kebutuhan fisiologis dan keselamatan terpenuhi. Ketika seseorang merasa aman dan terlindungi, mereka memiliki waktu dan energi untuk mencari cinta serta rasa memiliki. Kebutuhan cinta dan rasa memiliki mencakup memberi dan menerima kasih sayang, mencari teman hidup, bergaul, menjalin hubungan interpersonal, memperoleh perlakuan yang lembut, merasakan kebersamaan, dan menjalin pergaulan yang intim.

d. Kebutuhan Harga Diri (*Self Esteem Needs*)

Harga diri adalah penilaian individu terhadap nilai dirinya, yang diperoleh dengan mengevaluasi sejauh mana perilaku seseorang sesuai dengan ideal diri (Stuart & Sundeen, 1998). Menurut hierarki kebutuhan dasar manusia, kebutuhan harga diri dapat tercapai setelah kebutuhan untuk mencintai dan dicintai terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan harga diri terlihat dari sikap penghargaan diri. Kebutuhan penghargaan dan harga diri terkait dengan keinginan untuk meraih kekuatan,

pencapaian, rasa cukup, kompetensi, rasa percaya diri, dan kemerdekaan. Kebutuhan harga diri mencakup menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, dihargai oleh orang lain, kebebasan mandiri, prestise, pengakuan, dan penghargaan. Ketika kebutuhan ini terpenuhi, seseorang merasa percaya diri dan merasa berguna. Sebaliknya, jika kebutuhan penghargaan dan harga diri tidak tercapai, seseorang cenderung merasa tidak berdaya dan rendah diri.

e. Kebutuhan Aktualisasi diri (*Self Actualization Needs*)

Kebutuhan aktualisasi diri merupakan tingkat kebutuhan tertinggi menurut Maslow dan Kalish. Untuk mencapai tingkat ini, terdapat berbagai hambatan yang dapat menghalangi, yang secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal berasal dari dalam diri individu, seperti ketidaktahuan tentang potensi diri, serta perasaan ragu dan takut untuk mengungkapkan kemampuan yang dimiliki, sehingga potensi tersebut tetap terpendam. Berdasarkan teori Maslow mengenai aktualisasi diri, ada asumsi dasar bahwa manusia pada dasarnya memiliki nilai intrinsik berupa kebaikan, yang memberikan peluang bagi mereka untuk mengembangkan diri.

2.5 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami hambatan, kesulitan, atau gangguan dalam melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dari aspek jasmani, rohani, maupun sosial. Kondisi tersebut menyebabkan PPKS memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial agar mampu meningkatkan keberfungsian sosial,

mengembangkan potensi yang dimiliki, serta memperoleh kesempatan yang sama untuk menjalankan kehidupan secara mandiri dan sejahtera. Pelayanan kesejahteraan sosial diberikan melalui berbagai bentuk intervensi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sasaran, seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, PPKS menjadi sasaran utama berbagai program pemerintah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penanganan terhadap PPKS tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas individu, keluarga, maupun kelompok agar mampu mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi dan mencapai kemandirian. Oleh karena itu, upaya penanganan PPKS dilakukan secara terpadu melalui kerja sama lintas sektor dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Berdasarkan karakteristik permasalahan sosial yang dihadapi, PPKS terdiri atas berbagai jenis sasaran pelayanan. Mengacu pada ketentuan yang berlaku, kelompok PPKS meliputi individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial akibat mengalami kerentanan sosial, ekonomi, maupun psikologis. Beberapa kelompok yang termasuk dalam PPKS antara lain anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, korban bencana, korban tindak kekerasan, fakir miskin, perempuan rentan, serta kelompok masyarakat lain yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya. Pengelompokan tersebut menjadi dasar dalam menentukan bentuk pelayanan dan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan

masing-masing sasaran. Dalam konteks penelitian ini, perempuan kepala keluarga yang mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, maupun perlindungan sosial dapat dikategorikan sebagai kelompok yang berpotensi menjadi PPKS apabila kondisi tersebut menghambat keberfungsian sosialnya. Oleh karena itu, diperlukan berbagai program pemberdayaan, seperti Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian ekonomi, dan kemampuan perempuan kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarganya.

2.6. Penelitian Sebelumnya

Tabel 2. 1 Penelitian Sebelumnya

KOMPONEN	KETERANGAN
Nama Penulis	Siti Nurgiana, Dadang Kuswana, Indira Sabet
Judul Artikel	Pemberdayaan Perempuan melalui Perempuan Kepala Keluarga dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga
Nama Jurnal	Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Metode	Kualitatif
Hasil	Hasil dari penelitian program PEKKA terhadap peningkatan ekonomi keluarga yaitu meningkatkan taraf hidup, membangun kesadaran kritis, dan terpenuhinya kebutuhan keluarga.
URL	Volume 6, Nomor 1, 2021, 21-42 https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin
Nama Penulis	Dwi Ermayanti Susilo, Rahmad, Rahmadhani
Judul Artikel	Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Terhadap Peningkatan Pendapatan Di Desa Serning Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang
Nama Jurnal	Prosiding SNEB tahun 2022
Metode	Kuantitatif
Hasil	Hasil penelitian menunjukan bahwa program PEKKA berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan di desa

	serning sehingga program ini di nilai efektif
URL	https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/SNEB/article/view/965
Nama Penulis	Oktaviani Nindiya Purtri, Rudi Saprudin
Judul Artikel	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
Nama Jurnal	Academia.edu
Metode	Kualitatif
Hasil	peningkatan keterampilan anggota, membangkitkan rasa percaya diri, menghilangkan hambatan, penguatan kelompok, pemberian bimbingan dan dukungan, serta pengembangan jaringan dan pemeliharaan kemampuan anggota. Kemudian kegiatan pemberdayaan perempuan ini dinilai bermanfaat dalam meningkatkan perekonomian keluarga.
URL	https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net
Nma Penulis	Touvano, Franisco
Judul Artikel	Evaluasi program pemberdayaan perempuan kepala keluarga : studi kasus kelompok PEKKA Mawar Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung
Nama Jurnal	Unpar institutional repository
Metode	Kualitatif
Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan program PEKKA sesuai kebutuhan dan kondisi peserta program. Penggunaan sumber daya manusia dan dana sudah baik dan maksimal serta sarana dan prasarana tersedia secara baik dan memadai.
URL	http://hdl.handle.net/123456789/643
Nama Penulis	Iqbal Adnawi, Ila Rosmilawati, Herlina Siregar
Judul Atikel	Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga
Nama Jurnal	Jurnal Niara
Metode	Kualitatif
Hasil	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa anggota kelompok PEKKA Anyelir memiliki kehidupan yang berbeda-beda dimana sebagian hidup dengan suami yang tidak bekerja dan sebagian lagi hidup tanpa kehadiran suami. Kehidupan anggota kelompok PEKKA pun dibantu oleh pendapatan dari anak dan usaha yang

	digelutinya.
URL	https://journal.unilak.ac.id/index .
Nama Penulis	Anih Sri Suryani
Judul Artikel	Pengaruh Kualitas Lingkungan Hidup Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Di Provinsi Banten
Nama Jurnal	Jurnal Masalah-Masalah Sosial Hasil penelitian di Provinsi Banten
Metode	Kuantitatif
Hasil	menunjukkan bahwa semua indeks kualitas lingkungan berkorelasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar, kecuali indeks keanekaragaman hayati. Berdasarkan uji korelasi didapatkan bahwa semua indeks kualitas lingkungan berpengaruh positif terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Hal ini berarti, apabila terjadi kenaikan kualitas udara, kualitas air, tutupan lahan, keanekaragaman hayati, kesehatan masyarakat, dan kesehatan lingkungan maka pemenuhan kebutuhan dasar akan meningkat, begitu juga sebaliknya. Indeks kualitas udara dan tutupan lahan mempunyai konstanta yang paling besar di antara indeks lainnya. Dengan demikian, kenaikan dari nilai tersebut akan berdampak lebih besar pada kenaikan pemenuhan dasar, demikian juga sebaliknya
URL	https://www.researchgate.net/publication/377847162_Pengaruh_Kualitas_Lingkungan_Terhadap_Pemenuhan_Kebutuhan_Dasar_di_Provinsi_Banten
Nama Penulis	Drs. Abdul Samad Asaf, M.M
Judul Artikel	Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia
Nama Jurnal	Jurnal Cakrawarti
Metode	Kualitatif
Hasil	kebutuhan yang langsung mempengaruhi hidup matinya seseorang, sehingga perlu segera untuk dapat di penuhi kebutuhan terhadapnya. Kebutuhan dasar manusia di kelompokkan menjadi lima jenis yang pemenuhannya di lakukan secara berjenjang sehingga berbentuk pireamid. Artinya kebutuhan yang berada pada jenjang yang pertama perlu lebih dahulu sebelum seseorang meningkat memenuhi kebutuhan yang kedua dan seterusnya. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan pengakuan dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan manusia tidak mungkin dapat di capai tanpa upaya untuk memenuhinya , baik upaya tersebut di lakukan sendiri-sendiri maupun secara berkelompok. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia diupayakan melalui berbagai kegiatan pembangunan yang di

	lakukan oleh pemerintah bersama masyarakat.
URL	https://www.researchgate.net/publication/344699693_Upaya_Pemenuhan_Kebutuhan_Dasar_Manusia
Nama Penulis	Endang Hermawan, Rini Sulastri
Judul Artikel	Pentingnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Nama Jurnal	<i>Journal of Digital Society</i>
Metode	Kualitatif
Hasil	Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat tiga komponen utama dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada setiap program pemberdayaan masyarakat yaitu: kebutuhan fisik, kultural dan kebutuhan yang lebih tinggi.
URL	https://jurnal.panengeninsani.com/index.php/djods/article/view/95#:~:text=Pemberdayaan%20masyarakat%20bertujuan%20untuk%20memberikan,dan%20kebutuhan%20yang%20lebih%20tinggi.
Nama Penulis	Denti Kardeti, Rd. Enkeu Agiati
Judul Artikel	strategies to fulfill family needs in socioeconomically vulnerable women
Nama Jurnal	Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora
Metode	Kuantitatif
Hasil	Hasil penelitian menunjukkan bahwa para partisipan menggunakan template strategi yang sama untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang miskin. Pemenuhan kebutuhan ekonomi dilakukan dengan cara berdagang makanan ringan di pasar. Kemudian, dilakukan penghematan bahan pangan agar terpenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan bisa sedikit menyisihkan uang untuk pemenuhan kebutuhan lainnya
URL	https://journals.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/download/56753/23940?utm_source
Nama Penulis	Syaiful Marwan, Himyar Pasrizal
Judul Artikel	manajemen pemenuhan kebutuhan anak di keluarga dalam perspektif gender
Nama Jurnal	Jurnal Agenda

Metode	Kualitatif
Hasil	Dalam konteks gender, terkadang anak laki-laki lebih sering diprioritaskan dibandingkan anak perempuan. Namun di sisi lain, anak perempuan juga memiliki banyak kebutuhan yang berkaitan dengan kodratnya sebagai perempuan. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan adanya perbedaan dalam pemenuhan kebutuhan yang memerlukan pertimbangan dari orang tua.
URL	https://pdfs.semanticscholar.org/72c7/106a798a89e2e0aa44467bcc0fff5b45d34b.pdf?utm_source

2.7 Kerangka Pemikiran

1. Kutipan ke 1 (Teori terkait dengan Ilmu Kesos)

Kesejahteraan sosial adalah sebuah keadaan dan sistem layanan sosial yang bertujuan untuk mendukung individu, kelompok, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan vital, meningkatkan kemampuan untuk bersosialisasi, serta menyelesaikan berbagai tantangan sosial yang ada. Kesejahteraan sosial diwujudkan lewat beragam program, kebijakan, dan layanan sosial yang dirancang untuk menciptakan situasi hidup yang lebih makmur dan adil. Zastrow (1999)

2. Kutipan Ke 2 (Teori Pekerjaan Sosial)

Pekerjaan sosial adalah kegiatan profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas dalam meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka untuk berfungsi secara sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang mendukung tujuan-tujuan mereka. (NASW, 2013).

3. Kutipan ke 3 (x)

Pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan kelompok lemah agar mampu memenuhi kebutuhan dasar, mengakses sumber daya produktif, dan berpartisipasi dalam pembangunan (Suharto, 2010).

4. Kutipan ke 4 (Y)

Manusia mempunyai kebutuhan tertentu yang harus dipenuhi secara memuaskan melalui proses homeostatis, baik fisiologis maupun psikologis. (Maslow, 1943)

5. Kutipan ke 5 (variable X berpengaruh ke Y)

Berdasarkan pendapat Suharto (2010), pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan kelompok yang lemah agar mampu memenuhi kebutuhan dasar, memperoleh akses terhadap sumber daya produktif, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dengan demikian, semakin baik pelaksanaan pemberdayaan, maka semakin besar peluang individu untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran